

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Strategi *offshore outsourcing* di bawah pemerintahan neoliberal Bangladesh telah membuka ruang bagi kerusakan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber utama dari degradasi lingkungan yang terjadi akibat proses produksi RMG sendiri adalah pengelolaan limbah non etikal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa limbah produksi dari sektor RMG diakibatkan oleh perilaku oknum produsen yang mengabaikan pentingnya penggunaan pengolah limbah air, dampak yang terjadi akibat emisi yang dihasilkan dari mesin-mesin pabrik dan kendaraan yang menjadi bagian dari rantai pasokan industri *fashion*, serta pentingnya efisiensi produksi pakaian jadi sehingga menyebabkan penumpukan limbah padat di permukaan tanah dan TPA. Namun, maraknya praktik non etikal yang dilakukan oleh para produsen pun bukan sepenuhnya menjadi kesalahan mereka. Meskipun menjadi subjek yang paling dekat dengan proses produksi dan secara langsung menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, produsen yang khususnya meliputi para pemilik pabrik dan buruh merupakan aktor di level terendah dalam rantai pasokan bisnis *fast fashion*. Selain berasal dari faktor internal, perilaku mereka juga ditentukan oleh faktor eksternal yang dikendalikan oleh para aktor di tingkatan yang lebih tinggi. Jika para aktor tersebut mengancam eksistensi para produsen dengan kekuatan yang mereka miliki, maka mau tak mau para produsen akan mencari cara untuk mempertahankan bisnis mereka dengan segala cara, termasuk cara-cara non etikal seperti pengurangan pengelolaan limbah.

Sebab itu, meskipun secara eksplisit degradasi lingkungan di Bangladesh yang diakibatkan oleh strategi *offshore outsourcing* bisnis *fast fashion* merupakan tanggung jawab kolektif dari jajaran perusahaan multinasional dan produsen lokal yang bekerja sama dalam melakukan produksi garmen, tetapi aktor yang memungkinkan perusahaan multinasional dan para produsen garmen dapat bertemu dan melakukan kerja sama adalah pemerintah Bangladesh itu

sendiri. Alhasil, dalam penelitian ini pemerintah dapat dikatakan menjadi aktor kunci yang berpartisipasi dalam timbulnya degradasi lingkungan di Bangladesh. Karena pasar neoliberal dianggap sebagai sistem intervensionis yang tidak dapat bertahan dengan sendirinya, peran pemerintah Bangladesh dalam sistem *offshore outsourcing* di industri *fashion* pun sangat krusial bagi kelangsungan bisnis MNC yang berkecimpung dalam industri tersebut. Tanpa campur tangan pemerintah, maka hampir mustahil bagi para investor asing untuk mengeksploitasi para pekerja di Bangladesh dan menyebabkan degradasi lingkungan.

Melalui penelitian ini, dapat dilihat bahwa Bangladesh memiliki regulasi yang longgar karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan sektor swasta daripada perlindungan dan pemeliharaan kualitas lingkungan. Untuk memastikan kenyamanan bagi para investor, regulasi lingkungan di Bangladesh yang telah ada juga sangat jarang diimplementasikan untuk mengurangi adanya gesekan di antara para pemangku kepentingan. Sikap ‘pilih kasih’ pemerintah tersebut juga diperburuk oleh keberadaan faktor eksternal berupa tekanan politik dan masalah kepatuhan dari para pemangku kepentingan yang ingin memanfaatkan lemahnya regulasi di Bangladesh. Pada akhirnya, akumulasi dari kepentingan pemerintah, MNC, dan para pemangku kepentingan terkait telah mendorong aktor yang berada di level terendah, yaitu produsen, untuk melakukan praktik-praktik non etikal sehingga dalam sistem *offshore outsourcing* terdapat banyak hal yang merugikan masyarakat Bangladesh, terutama terkait degradasi kualitas lingkungan.

Adapun penanggulangan untuk fenomena degradasi lingkungan yang disebabkan oleh strategi *offshore outsourcing* dalam bisnis ini ini berdasarkan GPT adalah penerapan ekosentrisme, batas pertumbuhan, dan desentralisasi. Dalam konteks ini, ekosentrisme bisa didapatkan melalui penerapan rantai pasokan yang mengedepankan etika terhadap para pekerja dan lingkungan. Agar dapat memiliki jangkauan yang luas, *fashion* etikal harus diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk para konsumen. Sementara

itu, untuk membatasi pertumbuhan, pemerintah Bangladesh sebagai aktor yang menjembatani bisnis di antara produsen dan investor harusnya membuat regulasi yang tegas dan mengikat untuk para produsen dan investor demi menciptakan perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik, Selain itu, pemerintah juga harus memiliki batasan jelas yang menentukan sejauh mana mereka dapat bertindak untuk menarik minat investor, terutama dari sektor swasta. Batas yang jelas tersebut bertujuan agar pemerintah setempat dapat menyesuaikan keinginan swasta dan mencapai tujuan ekonomi serta pembangunannya sambil tetap menerapkan kebijakan yang ketat untuk melindungi lingkungan mereka. Asumsi terakhir dari GPT adalah desentralisasi. Karena di beberapa sektor desentralisasi di Bangladesh dapat dikatakan belum berhasil, maka diperlukan desentralisasi yang lebih ketat dan terarah sehingga tidak ada celah untuk praktik korupsi.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoretis

Meskipun menjadi dasar dari penelitian ini, Green Politics Theory (GPT) merupakan teori yang masih banyak diperdebatkan karena asumsinya yang masih terlalu abu-abu. Di luar sana, gagasan ekosentrisme sendiri dianggap terlalu radikal dan kurang realistis. Sementara itu, para pencetus konsep batas pertumbuhan bahkan mengakui bahwa *soft tools* untuk mencapai transisi berkelanjutan merupakan pendekatan yang pastinya sulit diterima oleh masyarakat karena bersifat *unreliable* dan berada di luar kalkulasi rasional. Selain itu, gagasan GPT terkait desentralisasi juga tidak dapat seratus persen diandalkan karena keberhasilan sistem tersebut dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung dari cara pengimplementasiannya.

Tetapi perlu diingat bahwa GPT masuk ke dalam kategori *deep environmentalism*. Teori ini tidak terbatas pada asumsi saklek yang telah ada, tetapi dapat dikembangkan dengan cara-cara yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, desentralisasi tidak harus selalu menjadi solusi bagi penanggulangan masalah lingkungan. Menurut Eckersley (2004), tujuan desentralisasi dapat dicapai melalui praktik inklusif, seperti

pembentukan hubungan yang baik antara negara dan masyarakat secara terkoordinasi, adopsi kebijakan modernisasi ekologis dan kritis, dan kewarganegaraan lingkungan yang aktif secara internasional. Jadi, untuk menemukan solusi dari apa yang ada di dalam gagasan Greens, dibutuhkan pemikiran yang luas dan radikal dalam mencari jalan keluar demi mencapai kehidupan yang berlandaskan ekosentrisme. Oleh karena itu, untuk penelitian terkait di masa depan, penulis menyarankan penulis lainnya untuk menggali esensi GPT secara lebih mendalam dengan mengelaborasi dan merasionalkannya melalui cara-cara yang kreatif sehingga dapat menciptakan argumen yang lebih kuat lagi.

6.2.2 Saran Praktis

Studi terkait degradasi lingkungan yang disebabkan oleh bisnis *fast fashion* dalam penelitian ini masih bersifat umum. Oleh karena itu, jika para peneliti lainnya hendak melakukan penelitian yang relevan, maka mereka dapat mencari degradasi lingkungan yang bersifat khusus, misalnya yang berfokus pada peningkatan pencemaran air atau polusi udara saja. Selain itu, bagi penulis yang ingin melakukan penelitian terkait secara lebih mendalam dapat mencari penyebab degradasi lingkungan melalui sudut pandang lain seperti isu rantai pasokan, kerja paksa, *greenwashing*, dan sebagainya. Di samping itu, bisnis *fast fashion* tidak hanya semata-mata menyebabkan degradasi lingkungan, tetapi juga menyebabkan berbagai permasalahan lain yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Sebab itu, penulis yang ingin menggali lebih dalam tentang dampak *fast fashion* dalam lingkup internasional dapat menggunakan aspek lain yang belum dibahas dalam penelitian ini.